

GERAKAN SOSIAL DI YOGYAKARTA DALAM BINGKAI REFORMASI 1998

Vionita Vara Fitrianti, Agung Bahroni
Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: vionitavara.2023@student.uny.ac.id, agungbahroni.2022@student.uny.ac.id

Abstrak-Gerakan reformasi tahun 1998 di Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk masyarakat Yogyakarta yang turut menuntut untuk dilakukannya reformasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian historis berdasarkan konsep dari Kuntowijoyo dengan menggunakan pendekatan teori gerakan sosial. Hasil dari penelitan ini adalah, (1) munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan korupsi, kolusi, nepotisme; (2) Gerakan reformasi 1998 juga terjadi di Yogyakarta dimulai dari Universitas Gadjah Mada yang kemudian mendapatkan sambutan positif dan dukungan dari masyarakat Yogyakarta; (3) puncak perjuangan gerakan reformasi di Yogyakarta adalah saat *Pisowanan Agung* dengan dibacakannya maklumat oleh Sultan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan reformasi 1998.

Kata kunci: *Gerakan Reformasi, Gerakan Sosial, Pisowanan Agung, Yogyakarta.*

SOCIAL MOVEMENTS IN YOGYAKARTA IN THE FRAME OF 1998 REFORMATION

Vionita Vara Fitrianti, Agung Bahroni
Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: vionitavara.2023@student.uny.ac.id, agungbahroni.2022@student.uny.ac.id

Abstract-The 1998 reform movement in Indonesia by college students received support from various elements, including the people of Yogyakarta who also demanded reform. This article uses a historical research method based on the concept of Kuntowijoyo using a social movement theory approach. The results of this research are, (1) the emergence of the reform movement was motivated by various things including the economic crisis, crisis of trust, and corruption, collusion, nepotism; (2) The 1998 reform movement also occurred in Yogyakarta starting from Gadjah Mada University which then received positive response and support from the people of Yogyakarta; (3) the peak of the struggle of the reform movement in Yogyakarta was during *Pisowanan Agung* with the reading of an edict by the Sultan as a form of support for the 1998 reform movement.

Keywords: *Reform Movement, Social Movement, Pisowanan Agung, Yogyakarta.*

Pendahuluan

Gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah tantangan kolektif yang dilaksanakan oleh kelompok yang memiliki tujuan serta permasalahan serupa yang berhubungan erat dengan kelompok elite, penguasa, dan pihak yang bertentangan (Tarrow, 2011). Terdapat empat karakteristik utama gerakan sosial, yaitu: (a) penyusunan aksi disruptif yang melawan kelompok elite, penguasa, dan norma budaya, (b) gerakan sosial dilakukan untuk mendukung tuntutan serupa terhadap pihak yang bertentangan, penguasa, seta masyarakat elite, (c) memiliki akar pada rasa setia kawan atau identitas yang sama, dan (d) selalu melakukan aksi kolektifnya hingga mencapai status gerakan sosial. Peter I. Rose juga berpendapat bahwa dalam setiap struktur gerakan, terdapat beberapa komponen yang konsisten tidak peduli apapun bentuknya, yaitu ideologi, program atau kumpulan tujuan, rencana guna mencapai suatu tujuan, basis masa, serta kepemimpinan (Rose et al., 1977).

Pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia yang memiliki pengaruh penting bagi negara. Gerakan reformasi 1998 merupakan gerakan sosial yang diakibatkan karena meletusnya permasalahan yang telah lama menghantui Indonesia (Priambodo, 2016). Melalui reformasi, rakyat Indonesia meyakini bahwa hal tersebut akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Mahasiswa dan masyarakat yang bergabung dalam reformasi 1998 menuntut pembaruan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang dikuasai oleh presiden Soeharto. Mahasiswa juga menuntut menurunkan presiden Soeharto yang kemudian menjadi agenda nasional. Reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Gerakan mahasiswa dianggap sebagai gerakan yang tidak memiliki kepentingan terhadap kekuasaan (Efendy, 2015).

Di Yogyakarta, reformasi 1998 dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang diawali dengan menggelar konferensi guna membahas permasalahan yang terjadi selama masa Orde Baru (Eklöf & Studies, 1999; Priambodo, 2016). Mahasiswa selanjutnya menggelar kelompok solidaritas yang beranggotakan beberapa universitas di Yogyakarta, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Mereka menuntut penurunan harga bahan pokok dan reformasi politik. Gerakan mereka juga turut didukung oleh masyarakat Yogyakarta dan kaum intelektual serta tokoh agama. Demonstrasi yang terjadi di Yogyakarta sempat menimbulkan keributan hingga Sultan bertindak memberi peringatan bahwa hendaknya gerakan reformasi dilakukan dengan damai.

Puncak Gerakan Reformasi tahun 1998 di Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1998 yang berselang satu hari sebelum presiden Soeharto dilengserkan dalam jabatan Presiden Republik Indonesia. Puncak Gerakan Reformasi di Yogyakarta ditandai dengan pembacaan maklumat oleh Sultan Hamengkubuwono X beserta KGPAA Paku Alam VIII (Rizkiah et al., 2018). Peristiwa tersebut oleh warga Yogyakarta dikenal sebagai *Pisowanan Agung*. Berdasarkan peristiwa *Pisowanan Agung*, Sultan Hamengkubuwono X menyatakan dukungannya pada rakyat untuk melakukan reformasi secara damai. Sehingga perspektif dalam tulisan ini berfokus pada gerakan sosial masyarakat yang mengalami perubahan dan transisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan sistem politik pada tahun 1998 di Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penulisan artikel menggunakan metode sejarah berdasarkan teori Kuntowijoyo dengan melakukan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran sumber, dan penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2005). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan dikarenakan berbagai faktor antara lain ketidakpuasan, peluang politis, sumber daya, dan proses konstruksi makna sebagai bentuk perpecahan masyarakat (Klandermans, 2005). Selain itu, gerakan sosial juga dapat didefinisikan sebagai tindakan kolektif yang dipimpin dan dimotivasi oleh sejumlah orang yang mempunyai kesamaan tujuan dalam ranah antarhubungan dengan kelompok elite, penguasa, dan pihak lawan (Tarrow, 2011). Pendekatan dalam teori gerakan sosial digunakan dalam menganalisis gerakan masyarakat pada masa reformasi tahun 1998 menjelang turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah majalah, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Munculnya Gerakan Sosial Reformasi di Indonesia Tahun 1998

Pada tahun 1998, gerakan sosial guna melakukan reformasi terjadi secara meluas di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya menargetkan perubahan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi muncul sebagai respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang mengalami kemelut sejak tahun 1997 diberbagai bidang. Situasi kemelut tersebut dipicu oleh kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam mengelola kehidupan masyarakatnya di berbagai sektor kehidupan (Dwiyanto, 2009). Sebagai akibatnya, masyarakat Indonesia merasa perlu untuk melakukan perubahan, salah satunya dengan menuntut adanya pergantian tampuk kekuasaan yaitu dengan melengserkan Presiden Soeharto guna mengakhiri masa-masa kekuasaan Orde Baru.

Munculnya gerakan sosial yang dipelopori oleh mahasiswa sejak bulan Juli 1997 dipicu oleh adanya krisis moneter yang mengakibatkan adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah (Zamroni & Andin, 1998). Krisis moneter berdampak pada melonjaknya harga pangan, sandang, papan dan barang yang dibutuhkan sukar untuk didapat, angka pengangguran semakin marak, banyaknya angka putus sekolah, banyak pekerja yang terkena PHK, dan laju inflasi yang semakin tinggi. Selain permasalahan tersebut, terungkapnya utang luar negeri memperkeruh situasi saat itu. Sehingga masyarakat khususnya mahasiswa mulai melakukan demonstrasi.

Di era Soeharto, selain adanya krisis moneter terdapat permasalahan lain yaitu krisis institusi yang menyebabkan politik tidak berjalan dengan baik dan hukum yang buruk (Kusuma, 2018). Kebijakan yang di tetapkan antara lain dwi fungsi ABRI semakin digalakkan sehingga jabatan sipil lebih banyak dikuasai oleh pejabat militer, terdapat penangkapan aktivis secara tanpa peradilan, pembatasan pers, dan intervensi pengaturan eksekutif terhadap lembaga legislatif serta lembaga yudikatif (Zamroni & Andin, 1998). Berdasarkan situasi tersebut, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat lebih mempercayai tokoh intelektual khususnya dari lingkungan kampus (Sindhunata, 1998).

Rezim Orde Baru identik dengan kepemimpinan yang represif terhadap masyarakat. Pemerintah cenderung mengabaikan keadilan masyarakat, hak asasi manusia, dan menyekat suara kritis dari masyarakat. Kontrol yang sangat kuat oleh birokrasi masa Orde Baru tersebut mengakibatkan padamnya kreativitas publik. Masa akhir pemerintahan Orde Baru, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin mengalami penurunan hingga sampai ke titik yang sangat rendah dikarenakan banyaknya penyimpangan oleh aparat pemerintahan yang sulit dipahami oleh masyarakat (Hamoko et al., 2003).

Selain adanya krisis keadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjamur dan menguras kekayaan milik negara. Di era Soeharto, upaya pemberantasan korupsi tidak berubah secara signifikan. Bahkan rezim Orde Baru tersebut melibatkan Golkar dan ABRI yang secara sistematis menguras kekayaan negara. Tingginya kasus korupsi menempatkan Indonesia mencapai peringkat lima besar di antara negara di dunia (Hamzah, 2005). Praktik korupsi tersebut tidak terjadi di lingkungan pemerintahan saja, tetapi masuk ke kelompok militer. Orde Baru memberi kesempatan untuk menimbun kekayaan yang sangat luas untuk para pejabat militer. Proses memperkaya diri sendiri di masa Soeharto tersebut mengakibatkan rakyat Indonesia terjatuh kemiskinan.

Gerakan reformasi 1998 diawali oleh para mahasiswa yang memiliki keresahan akan fenomena yang terjadi di sekitar. Gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat yang sebelumnya tidak direncanakan. Media dan kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab yang menginspirasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Mahasiswa merumuskan isu pada aksi demonstrasi berdasarkan berita dalam media massa. Contohnya di Surabaya, mahasiswa menggunakan berita dari Liputan 6 dan SCTV sebagai referensi perumusan isu (Ishadi Sutopo, 2014). Sehingga dengan berkembangnya teknologi informasi, gerakan reformasi semakin masif di Indonesia.

Munculnya kelompok kelas menengah baru atau *new rich* juga turut berpengaruh dalam gerakan reformasi 1998 (Heryanto, 1999). Adanya konsumerisme yang tinggi berperan penting dalam budaya kontemporer Indonesia. Anggota kelas baru adalah lulusan dari berbagai universitas di Indonesia yang berperan penting dalam gerakan reformasi. Rata-rata usia dari *new rich* tersebut adalah 40an tahun yang merupakan mantan aktivis tahun 1970/1980an (Prasisko, 2016). Beberapa di antaranya menghadapi kesulitan ekonomi akibat krisis yang mengakibatkan bisnis yang bangkrut. Sehingga gerakan mahasiswa dilihat sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan. Sehingga, sebagian kelompok mahasiswa diberikan dukungan finansial dari kelompok kelas menengah baru yang mengakibatkan gerakan reformasi 1998 semakin kuat.

B. Gerakan Sosial di Yogyakarta Menuntut Reformasi Tahun 1998

Pada pertengahan Desember tahun 1997, kegiatan politik mahasiswa pro-reformasi dimulai di Yogyakarta. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar konferensi untuk membahas dampak krisis ekonomi dan politik terhadap masyarakat. Dalam konferensi tersebut, pemimpin mahasiswa mengakui bahwa mayoritas peserta menolak kembali terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk periode 1998-2003 (Eklöf & Studies, 1999). Pada bulan Januari 1998, aktivis mahasiswa di Yogyakarta membentuk Koalisi Demokratik untuk Kedaulatan Rakyat (KDUKR) dengan tujuan memfasilitasi gerakan reformasi. Koalisi ini mengajukan pembentukan masyarakat sipil bersama organisasi di Yogyakarta, melibatkan elite intelektual, pemimpin agama, seniman, aktivis LSM, dan partai politik untuk melindungi masyarakat dari kesulitan (Jae Bong, 2008).

Pada 8 Maret 1998, kelompok mahasiswa mulai melakukan demonstrasi di Kota Yogyakarta, namun dihadang oleh keamanan setempat (Jae Bong, 2008). Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di berbagai kota di Indonesia ketika MPR kembali memilih Soeharto untuk masa jabatannya yang ketujuh. Dalam situasi ini, pada tanggal 11 Maret 1998, sekitar 50.000 mahasiswa mengadakan aksi massa di kampus Universitas Gadjah Mada, menuntut total pembaruan baik secara politik maupun ekonomi (Priambodo, 2016; Yuristiadhi, n.d.). Para profesor dan dosen terkemuka turut hadir dalam pertemuan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak Mei 1998. Gerakan sosial mahasiswa pada 11 Maret, dianggap sebagai protes umum terbesar yang mencerminkan penolakan terhadap pelantikan Soeharto untuk masa jabatan yang ketujuhnya (Schwarz & Paris, 1999).

Pada tanggal 14 Maret 2023, Presiden Soeharto mengumumkan kabinet baru yang tidak dapat diterima oleh rakyat dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan memasukkan putri dan beberapa kawannya (Schwarz & Paris, 1999). Menanggapi peristiwa tersebut, para mahasiswa di Yogyakarta menuntut reformasi total. Mahasiswa melakukan *long march* ke DPRD dan mendapatkan tindakan represif dari pihak keamanan. Sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat yang represif, enam aktivis melakukan mogok makan. Jae Bong, Op. cit. Dengan adanya tindakan tersebut, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa semakin memanas dan mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk kaum intelektual dan pihak kampus. Mahasiswa yang turut bergabung tidak hanya dari Universitas Gadjah Mada saja, tetapi dari IKIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, Universitas Islam Indonesia, dan beberapa universitas lain di Yogyakarta.

Di bulan April 1998, banyak gesekan yang terjadi di antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan banyak mahasiswa yang terluka. Pada akhir April 1998, sebagian besar masyarakat, termasuk siswa sekolah menengah, penggemar, pekerja, dan ibu rumah tangga mulai memberikan dukungan dan turut serta dalam aksi demonstrasi reformasi mahasiswa di Yogyakarta (Febriyanti, 2016). Jae Bong, Ibid. Tingkat kekerasan demonstrasi semakin besar seiring dengan meningkatkan aktivis dalam gerakan reformasi. Akan tetapi, masyarakat di Yogyakarta bersatu dan berhasil membentuk jaringan untuk mencapai tujuan reformasi secara menyeluruh dalam menghadapi rezim Soeharto yang kemudian diberi nama Gerakan Rakyat Indonesia.

Pada awal Mei 1998, pemerintah mencabut subsidi listrik dan harga abhan bakar yang mengakibatkan gerakan reformasi lebih intensif dilakukan. Gerakan reformasi di Yogyakarta terus meluas dan banyak terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat (Al-Hamid, 2019). Pada tanggal 5 Mei, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan semakin membesar, bahkan menjadi lebih brutal ketika ribuan warga dari wilayah sekitar Jalan Gejayan di Yogyakarta juga ikut menyerang aparat keamanan (Aspinall, 2004). Warga di Yogyakarta tidak hanya menjadi penonton, akan tetapi aktif terlibat dalam demonstrasi. Bentrokan di jalan Gejayan mengakibatkan banyak orang yang terluka maupun hilang, bahkan memakan korban jiwa.

C. *Pisowanan Agung: Puncak Reformasi di Jogja Tahun 1998*

Pada pertengahan bulan Mei saat gerakan di Yogyakarta semakin masif dan mulai terdapat korban saat dilakukan demonstrasi gerakan reformasi, Sultan Hamengkubuwono X dan anggota keluarganya mengunjungi rumah sakit. Sultan juga menghimbau agar warga melakukan aksi demonstrasi secara damai. Akan tetapi, Sultan masih belum menyebutkan dukungannya kepada rakyat. Kemudian keesokan harinya, Sultan Hamengkubuwono X melanjutkan perjalanan ke kawasan jalanan Kota Yogyakarta (Nugroho, n.d.). Langkah tersebut dilakukan untuk meredakan kemarahan para demonstran. Dengan demikian, terjadi keterlibatan yang signifikan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan etnis dan agama.

Pada tanggal 20 Mei 1998, rakyat Yogyakarta melaksanakan *Pisowanan Agung* yang secara langsung dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam VIII. *Pisowanan Agung* merupakan pertemuan dimana raja dapat secara langsung bertemu rakyat guna menyalurkan aspirasi kultural dan mempertegas posisi keraton dalam ranah politik (Bharata et al., 2015). Acara tersebut dipelopori oleh Aksi mahasiswa Kagama (Keluarga Alumni Gajah Mada) mengadirkan sejumlah besar peserta yang berjumlah hampir mencapai satu juta orang yang bergerak menuju Alun-Alun Utara (Nusantara et al., 1998). *Pisowanan Agung* dimulai dari keberangkatan Sultan Hamengkubuwono X bersama KGPAA Paku Alam VIII bersama rombongan pada pukul 13.00 WIB yang diiringi oleh musik serta pengawal. Masyarakat yang hadir secara serentak menggemakan lagu Indonesia Raya di Alun-Alun Utara. Sumpah Rakyat turut dibacakan dalam momentum tersebut yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang bersatu tanpa penindasan, berbangsa yang cinta keadilan, dan berbahasa yang satu dan benar.

Maklumat dikemukakan oleh Sultan Hamengkubuwono X dalam *Pisowanan Agung* ditandatangani secara langsung oleh Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam VIII. Sultan Hamengkubuwono X kemudian membacakan. Acara kemudian diakhiri dengan doa bersama yang diwakili oleh lima perwakilan agama (Bharata et al., 2015). Acara tersebut berjalan dengan tertib dan khidmat. Maklumat 20 Mei 1998 yang dikeluarkan melalui *Pisowanan Agung* tersebut benar-benar memenangkan hati rakyat. Melalui *Pisowanan Agung*, masyarakat Yogyakarta serta Indonesia diminta oleh Sultan Hamengkubuwono X beserta KGPAA Paku Alam VIII untuk bergandeng tangan dalam gerakan reformasi serta memperkuat kepemimpinan nasional. Maklumat yang dibacakan dalam *Pisowanan Agung* juga meminta ABRI untuk bersatu dan melindungi rakyat serta mendukung gerakan reformasi sebagai bentuk solidaritas ABRI bersama dengan rakyat.

Sultan dalam *Pisowanan Agung* juga menyatakan bahwa saat ini kita berada di ujung atau mungkin awal dari jalan yang panjang. Sehingga menuntut partisipasi penuh rakyat untuk membawa Indonesia menuju tujuan yang di cita-citakan. Berintegrasinya D.I. Yogyakarta dengan negara Indonesia paska Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menandai proses demokratisasi di Yogyakarta yaitu rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan jalannya pemerintahan. Di satu sisi, Maklumat 5 September 1945 merupakan bentuk dukungan rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi Republik Indonesia. Hal inilah yang mengilhami masyarakat Yogyakarta untuk dapat dan turut serta berdiri bersama mendukung gerakan reformasi sebagai panggilan sejarah yang harus dijawab

Maklumat yang dibacakan dalam *Pisowanan Agung* disusun berdasarkan semangat perjuangan yang diilhami oleh asas kerakyatan serta Yogyakarta terhadap Republik

Indonesia yang telah tumbuh sejak masa-masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maklumat dalam *Pisowanan Agung* menjadi jalan dukungan terhadap gerakan reformasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. *Pisowanan Agung* tahun 1998 menjadi tradisi yang menghubungkan Sultan Hamengkubuwono X dengan rakyat. Acara tersebut sekaligus menjadi upaya untuk meredam situasi yang tidak kondusif di Yogyakarta tahun 1998 dikarenakan adanya gerakan reformasi 1998 yang dilakukan oleh rakyat. Berselang satu hari setelahnya, presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat.

Simpulan

Tulisan ini menguraikan dinamika gerakan sosial, khususnya Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, dengan fokus pada Yogyakarta. Gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk menghadapi ketidakpuasan terhadap kelompok elite, penguasa, dan norma budaya tertentu. Empat karakteristik utama gerakan sosial, seperti aksi disruptif, solidaritas, akar pada identitas kolektif, dan kelangsungan aksi kolektif, menjadi sorotan dalam konteks Gerakan Reformasi 1998. Gerakan ini mencapai puncaknya melalui partisipasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto.

Di Yogyakarta, gerakan dimulai oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan melibatkan berbagai kelompok di Yogyakarta. Keterlibatan Sultan Hamengkubuwono X dalam *Pisowanan Agung* pada tanggal 20 Mei 1998 menjadi momen krusial. Sultan menyatakan dukungan pada gerakan reformasi, menghimbau agar demonstrasi dilakukan secara damai, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu. *Pisowanan Agung* mencerminkan solidaritas rakyat dan mengakhiri dengan terwujudnya tujuan gerakan, termasuk mundurnya presiden Soeharto di tanggal 21 Mei 1998. Keseluruhan, gerakan sosial ini mencerminkan transisi signifikan dalam respons terhadap perubahan politik dan sosial pada era tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid, R. A.-H. R. (2019). Moral Politik Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 177–193.
- Aspinall, E. (2004). Indonesia: Transformation of civil society and democratic breakthrough. *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, 61–96.
- Bharata, B. S., Putranto, I. A., & Sulistyanyngtyas, I. D. (2015). *Keistimewaan Yogyakarta dalam lensa media*. Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dwiyanto, D. (2009). *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan*. Paradigma Indonesia Pers.
- Efendy, D. (2015). Collective Identity and Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime. *Journal Of Government and Politics*, 6(2), 203–213. <https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0015>
- Eklöf, S., & Studies, N. I. of A. (1999). *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-1998*. NIAS. <https://books.google.co.id/books?id=dTHbYpKEJAYC>
- Febriyanti, D. (2016). Signifikansi Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 98. *Avatara*, 4(3), 1156–1170.

- Hamoko, D., Muryantoro, H., Tashadi, T., & Nurdiyanto, N. (2003). *Demokrasi Dalam Perjalanan Sejarah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-Awal Reformasi*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Heryanto, A. (1999). The years of living luxuriously, Identity politics of Indonesia's new rich. In *Culture and privilege in capitalist Asia* (pp. 159–187). Routledge.
- Ishadi Sutopo. (2014). *Media dan kekuasaan: televisi di hari-hari terakhir Presiden Soeharto*. Penerbit Buku Kompas.
- Jae Bong, P. (2008). *Preventing ethnic violence in Indonesia: civil society engagement in Yogyakarta during the economic crisis of 1998* [Doctoral dissertation, The University of New South Wales]. <https://doi.org/https://doi.org/10.26190/unsworks/20296>
- Klandermans, B. (2005). *Protes dalam kajian psikologi sosial.(terj)* (Helly P. Soetjipto, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Kusuma, A. J. (2018). PENGARUH NORMA HAM DI DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP FENOMENA REFORMASI 1998 DI INDONESIA. *Jurnal PIR Vol, 3*(1).
- Nugroho, A. M. (n.d.). Makna Pisowanan Agung di Yogyakarta Tahun 1998-2008. *Dalam Avatara, 6*(4).
- Nusantara, A. A., Putra, R. M. S., & Sudarmanto, J. B. (1998). *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yN9wAAAAMAAJ>
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3*(2), 9–16.
- Priambodo, P. (2016). Studi Komparasi Model Aksi Demonstrasi dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1966 dan 1998. *Risalah, 2*(6).
- Rizkiah, N., Suwirta, A., & Supriatna, E. (2018). Suara Mahasiswa dari Dua Kota: Perbandingan Pandangan Isola Pos di Bandung dan Balairung di Yogyakarta terhadap Isu Politik di Indonesia, 1991-1998. *MIMBAR PENDIDIKAN, 3*(1), 11–30.
- Rose, P. I., Glazer, M., & Glazer, P. M. (1977). *Sociology: Inquiring Into Society*. Confiel Press.
- Schwarz, A., & Paris, J. (1999). *The Politics of Post-Suharto Indonesia*. Council on Foreign Relations Press. <https://books.google.co.id/books?id=JHAKLnyJeKQC>
- Sindhunata. (1998). Mahasiswa Mendobrak Pintu Krisis. *Majalah Basis, No. 05-06, Tahun Ke-47*.
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. In *Cambridge Studies in Comparative Politics* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511973529>

- Yuristiadhi, G. (n.d.). Gelora Reformasi dari Masjid Gedhe Kauman: Aksi Pertama Luar Kampus di Yogyakarta Jelang Lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 164–173.
- Zamroni, A., & Andin, M. (1998). *Pahlawan Reformasi: Catatan Peristiwa 12 Mei 1998*. Pabelan Jayakarta.